



PERAN DAN TANTANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMAMPIR DALAM MENYUKSESKAN PILKADA 2024

THE ROLE AND CHALLENGES OF THE SEMAMPIR DISTRICT ELECTION COMMITTEE IN MAKING THE 2024 ELECTIONS SUCCESSFUL

Dimas Dewangga Permana Oesijanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117,

Dimasdewangga2002@gmail.com

Abstract (English)

Examining the strategic role of the sub-district election committee (PPK) in implementing the 2024 regional elections in the Semampir sub-district, Surabaya city, East Java province. The main focus of this research is on the tasks and functions of PPK, the challenges they face in the field, and the impact of recent policies on the effectiveness of their work. Data was collected through literature studies and interviews with PPK members in the Semampir sub-district, Surabaya city. The research results show that although KDP has an important role in ensuring the regional elections run smoothly and transparently, they face various challenges, including a lack of resources, political pressure, and logistical constraints.

Article History

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 20 Desember 2024

Key Words

PPK, PILKADA 2024, Voter Participation

Abstrak (Indonesia)

Mengkaji peran strategis panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan pilkada 2024 di kecamatan semampir kota surabaya provinsi jawa timur. Fokus utama penelitian ini adalah pada tugas dan fungsi PPK, tantangan yang mereka hadapi di lapangan, serta dampak kebijakan ternaru terhadap evektifitas kerja mereka. Data di kumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan anggota PPK di kecamatan semampir kota surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPK memiliki peran penting dalam memastikan pilkada berjalan lancar dan trasparan, mereka menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk kurangnya sumber daya, tekanan politik, dan kendala logistik.

Sejarah Artikel

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 20 Desember 2024

Kata Kunci

PPK, PILKADA 2024, Partisipasi Pemilih

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi di indonesia untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh masyarakat. Tepat nya di tahun 2024, pilkada di kecamatan semampir di kota surabaya menjadi perhatian publik mengingat posisinya sebagai salah satu kota terbesar di iindonesia dengan pengaruh strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Surabaya memiliki sejarah panjang dalam pelaksaian demokrasi yang dinamis dan kompetitif. Berbagai macam isu lokal seperti tata kelola perkotaan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan transportasi, serta kesejahteraan masyarakat menjadi agenda utama yang di angkat



dalam pilkada tahun 2024 ini. Selain itu tantangan seperti partisipasi pemilih, polarisasi politik, serta potensi konflik sosial juga menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pilka 2024.

Pilkda 2024 juga menandai fase baru dalam dinamika politik lokal setelah pandemi covid 19 yang mengubah lanscape sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis strategi kampanye, pola partisipasi pemilih, serta kebijakan yang di tawarkan oleh para calon untuk mengatasi tantangan pasca pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek terkait pilkada 2024 di surabaya khusus nya di kecamatan semampir, termasuk dinamika politik, isu isu strategis, dan implikasi nya terhadap pembangunan kota. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika kontribusi terhadap pemahaman tentang demokrasi lokal dan menjadi acuan bagi perbaikan pelaksanaan pilkada di masa depan.

Rumusan Masalah

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) surabaya 2024, menjadi perhatian publik karena dinamika politik yang kompleks dan tantangan di era digital. Jurnal ini berfokus pada indentifikasi rumusan masalah yang terkait dengan pilkada di 2024. Meliputi aspek regulasi, partisipasi masyarakat, potensi konflik, hingga pengawasan.

Dengan pendekatan secara kualitatif jurnal ini bertujuan untukmemberikan pemahaman koperhensif tentang tantangan tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Rumusan masalah ;

1. Bagaimana efektifitas regulasi dalam menjamin pelaksanaan pilkada 2024 yang demokratis dan trasparan di wilayah kecamatan semampir ?
Regulasi yang meliputi aturan main, kampanye, dan pengawasan serigkali menhadapi interpretasi yang berbeda di tingkat pelaksana, sehingga dapat mempengaruhi proses demokrasi.
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pilkada 2024 dapat di tingkatkan ?
Tantangan rendahnya kesadaran politi, hoax, serta politik uang menjadi faktor yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.
3. Apa saja potensi konflik yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pilkada 2024 di kecamatan semampir dan bagaimana strategi mitigasinya?
Konflik politik, gesekan antar pendukung, hingga dinamika politik indentitas menjadi isu krusial yang memerlukan solusi sejak dini.
4. Bagaimana peran teknologi digital dalam mendukung pengawasan pilkada 2024 ?



METODE DAN TEORI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang artinya pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau masalah tertentu secara mendalam melalui pengumpulan data non numerik seperti wawancara observasi dan analisis dokumen. Berikut adalah penjelasannya:

1. pendekatan yang berfokus pada makna penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, persepsi atau pandangan dari berbagai pihak terkait pilkada 2024. Hal ini bisa melibatkan kajian tentang bagaimana masyarakat memandang proses pemilu, kampanye kandidat, atau isu-isu yang muncul selama pilkada.
2. Pengumpulan data secara mendalam. Data di kumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti kandidat, tim kampanye, pemilih, atau pengamat politik. Selain itu observasi langsung pada kegiatan kampanye atau debat publik juga bisa dilakukan. Saya sebagai penulis dapat juga menganalisis dokumen seperti berita, media sosial, dan laporan resmi KPU.
3. Analisis kontekstual. Penelitian dengan metode ini mengkaji pilkada 2024 dalam konteks sosial, budaya dan politik yang melingkupinya. Misalnya analisis bisa mencakup bagaimana dinamika politik lokal, isu yang diangkat kandidat, atau peran media mempengaruhi hasil pilkada.
4. Menggunakan pendekatan interpretatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan ini untuk memahami pola, tema atau narasi tertentu. Misalnya jika fokusnya adalah strategi kampanye, peneliti dapat menggali bagaimana narasi tertentu disampaikan oleh kandidat dan diterima oleh pemilih.
5. Hasil yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian tidak berupa angka atau statistik, melainkan deskripsi yang mendalam tentang fenomena pilkada. Misalnya peneliti bisa menjelaskan motivasi pemilih, dinamika konflik antar kandidat, atau pengaruh media sosial dalam kampanye.

Teori Penelitian

Beberapa teori yang bisa dipertimbangkan serta relevan untuk penulisan jurnal tentang pilkada 2024 dengan pendekatan kualitatif.

1. Teori demokrasi dan partisipasi politik.
 - a. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Surabaya berpartisipasi dalam pilkada, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, seperti pendidikan politik akses informasi, dan peran media
 - b. Peneliti dapat mengeksplorasi aspek partisipasi politik baik secara langsung (voting) maupun tidak langsung (kampanye, diskusi publik, dll)

PEMBAHASAN

Yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, keberadaan panitia pemilihan kecamatan (PPK) merupakan salah satu komponen penyelenggara. Keberadaan PPK diatur berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggara pemilihan umum. PPK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pilkada, oleh karena itu posisinya sebagai penanggung jawab lapangan penyelenggaraan pilkada. Maka dari itu dapat di



katakan bahwa panitia pemilihan tingkat kecamatan merupakan salah satu ujung tombak yang menentukan baik buruknya pelaksanaan pilkada.

Penelitian ini akan mencoba menggali dan mengidentifikasi kinerja PPK kecamatan semampir di Surabaya, ada saat penyelenggaraan pilkada kota Surabaya kecamatan semampir di tahun 2024. Pada dasarnya mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah di buat tidak sekedar sebagai sebuah perwujudan bentuk pemerintah yang demokratis, tetapi lebih jauh dari itu yaitu untuk menghasilkan pemerintah daerah yang tidak hanya legitimate, tetapi memiliki *good will* political will yang kuat, serta sungguh sungguh menjaankan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia pasca pemerintahan rezim Orba telah merancang struktur penyelenggara pemilihan di seluruh strata contohnya pilkada. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, melalui lembaga komisi pemilihan umum memberikan tugas dan wewenang kepada PPK yang terpilih melalui seleksi yang diadakan oleh KPU sebagai badan ADHOC. Dimana telah diatur berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

PPK dalam melaksanakan tugas berjenjang melalui KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA. PPK dibentuk langsung oleh komisi pemilihan umum (KPU) tingkat kabupaten / kota paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara dan di bubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara yang berdasarkan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 2015.

Sebagai petugas PPK pada pilkada 2024 di Surabaya khususnya kecamatan semampir ada berbagai peran penting dan tantangan yang dihadapi. Tugas PPK yakni melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kecamatan, PPK bertanggung jawab mengelola tahapan pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi administrasi, distribusi logistik, hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan.

Adanya koordinasi dengan PPS dan KPU kota Surabaya, PPK menjadi penghubung antara panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan dengan KPU kota untuk memastikan keancaran pelaksanaan pilkada. Adanya supervisi dan pengawasan yang berguna untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan memastikan tidak ada pelanggaran, baik teknis maupun administratif di wilayah tugasnya masing-masing.

SDM atau pendidikan para pemilih juga sangat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses pemilu, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Surabaya dalam pilkada. Yang paling terakhir tugas dari PPK adalah rekapitulasi dan pengolahan data suara, setelah pemungutan suara selesai PPK melakukan rekapitulasi suara dari tingkat kelurahan untuk diteruskan ke KPU.

Menjadi PPK juga mengalami banyak tantangan. Tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi, dengan padat nya tahapan pemilu petugas PPK harus bekerja di bawah tekanan waktu, terutama menjelang hari pemungutan suara dan rekapitulasi. Pilkada sering kali menjadi ajang persaingan politik yang tajam sehingga sering terjadi kerawanan konflik. Petugas PPK perlu menghadapi potensi dari peserta pemilu, saksi, bahkan masyarakat yang tidak puas dengan proses dan hasil pemilu.



Kita sebagai petugas PPK harus menjaga independensi dan netralitas merupakan tantangan yang utama, terutama jika ada godaan politik uang dan tekanan dari pihak tertentu. Surabaya sebagai kota besar memiliki jumlah pemilih yang signifikan sehingga distribusi logistik pemilu seperti surat suara dan alat coblos memerlukan koordinasi yang sangat baik agar tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Masalah teknis dan administrasi serta kesalahan dalam perhitungan suara pengisian formulir, atau masalah teknis lainnya bisa memicu permasalahan hukum atau ketidakpuasan peserta pemilu. Untuk meningkatkan kesadaran partisipasi aktif masyarakat, agar memanfaatkan suara atau hak mereka secara penuh, dikarenakan dalam pemilihan umum 1 suara itu menentukan keberlanjutan tongkat estafet kepemimpinan terhadap jangka 5 tahun ke depan.

Pelatihan dan bimbingan teknis merupakan strategi menghadapi tantangan dari berbagai pihak, yang mana pelatihan ini diselenggarakan oleh KPU untuk memastikan mereka paham tugas dan tanggung jawabnya. Koordinasi yang baik terhadap KPU kota Surabaya, PPK, dan stakeholder lainnya sangat penting untuk mengatasi kendala di lapangan serta menjalin komunikasi yang efektif.

Pemanfaatan teknologi juga sangat penting untuk mempermudah rekapitulasi data dan distribusi logistik, sekaligus melindungi data pemilih. Tidak kalah pentingnya melibatkan pendekatan partisipatif tokoh masyarakat dan komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Surabaya khususnya kecamatan semampir. Dengan peran krusial dan tantangan besar ini petugas PPK diharapkan dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas. Demi keberhasilan pilkada 2024 di Surabaya.

KESIMPULAN

Peran PPK dan PPS dalam pilkada 2024 di Surabaya sangat penting untuk menjamin kelancaran setiap tahapan pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan. Mereka bertanggung jawab mengelola proses administratif, logistik dan pengawasan, sekaligus memastikan partisipasi masyarakat serta menjaga transparansi dan akurasi data pemilu. Namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan seperti beban kerja tinggi, tekanan dari pihak tertentu, risiko konflik dan tuntutan menjaga netralitas di tengah iklim politik yang dinamis. Selain itu mereka harus mampu mengelola logistik secara efisien, mengatasi masalah teknis, serta meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat yang heterogen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan pelatihan intensif, dukungan teknologi, komunikasi efektif dan komitmen terhadap prinsip independensi serta integritas. Dengan profesionalisme dan kerja sama, PPK dan PPS dapat menjadi pilar suksesnya pilkada 2024 di Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Boyne, George A., 2006., Introduction dalam George A. Boyne., *Public Service*

Performance on Measurement and Management., Cambridge : Cambridge University

Budiarjo, Miriam., 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.



Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan*

Konseling., PT Rajagrafindo Persada, Leuwinanggung.

Widodo, Joko., 2004., Good Governance, *Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi.*, Jakarta : Gramedia.

Wood, Jack, Joseph Wallace, Rachid M Zeffane, Schermerhon, Hunt, and Osborne.,

2001., *Organizational Behavior, A Global Perspective.*, Australia : John Willey and Sons.

Sinambela, L. P.dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan

Implementasi., Bumi Aksara, Jakarta.